

Abstrak

Ipah Syarifah, “*Peran Istri Yang Berprofesi Sebagai Anggota Dewan Ditinjau dari Hukum Keluarga (Study Lapangan di Kantor DPRD Kota Bandung)*”, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung, 2019.

Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap partai politik yang mau mengikuti pemilihan umum harus memiliki caleg perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Hal ini membuat tidak sedikit kaum perempuan yang akhirnya menggunakan peluang tersebut untuk terjun ke dunia politik sebagai salah satu sarana penyampaian hak-hak suara perempuan yang terkadang kurang tersentuh saat kaum laki-laki mendominasi dunia politik. Kendati demikian tidak semua anggota dewan perempuan yang setelah menjabat lantas dapat dengan mudah menyeimbangkan perannya antara di parlemen dengan rumah tangga sehingga menjadi konflik tersendiri dalam kehidupan rumah tangga saat kewajiban utama sebagai istri tidak mampu dijalankan dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban istri di keluarga dalam pandangan hukum keluarga Islam dan Undang-undang, guna mengetahui optimalisasi kewajiban anggota dewan perempuan di keluarga, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Istri yang berprofesi sebagai anggota dewan.

Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka pemikiran adalah Pasal. 65 ayat 1 UU NO. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kedua, mengenai subyek hukum dalam pasal ini adalah setiap partai politik peserta pemilihan umum. Ketiga, obyek hukum khususnya yang menjadi bahan penelitian penulis adalah anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Kota Bandung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan metode study lapangan dan penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, dokumen catatan, tesis terdahulu dan lain-lain.

Oleh karena banyak waktu untuk keluarga yang tersita maka langkah yang dilakukan agar tetap bisa mengoptimalkan peran sebagai ibu dan anggota dewan adalah harus pandai membagi waktu dan keluarga tetap jadi prioritas utama. agar seorang istri yang berprofesi sebagai anggota dewan bisa tetap menjaga hubungannya dengan suami dan anak-anak nya agar tetap berkualitas dalam arti lain kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bisa tetap terlaksana adalah dengan tetap menjaga komunikasi dengan suami dan anak-anak khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatannya sebagai anggota dewan. Agar seorang perempuan dapat mengoptimalkan perannya di rumah dan parlemen maka perlu memanfaatkan waktu berkualitas untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu, dengan menjadi seorang anggota dewan yang merupakan amanah besar maka sudah seharusnya tidak boleh lepas dari Allah dalam artian harus senantiasa meningkatkan nilai-nilai spiritual, menjaga jarak dengan yang bukan muhrim dan tidak terlalu terbuka dalam memberikan informasi pribadi.

Kata Kunci: Optimalisasi, Peran Istri, Anggota Dewan

Abstract

Ipah Syarifah, *"The Role of Wives Who Work As Board Members Judging from Family Law (Field Study at the Bandung DPRD Office)"*, Thesis of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate of Bandung State Islamic University, 2019.

Article 65 paragraph 1 of Law Number 12 of 2003 states that every political party that wants to take part in general elections must have at least 30 percent female candidates. This makes not a few women who finally use these opportunities to plunge into politics as a means of delivering women's voting rights which is sometimes less touched when men dominate politics. However, not all women councilors who after taking office can easily balance their roles in parliament with the household and eventually take the road to divorce.

The research objective of this study was to determine the obligations of wives in the family in view of Islamic family law and the law, to determine the optimization of the obligations of female board members in the family, and to understand the views of Islamic Family Law on Wives who work as council members.

In this research, the framework for thinking is Article. 65 paragraph 1 of Law NO. 12 of 2003 concerning the Election of Members of the DPR, DPD and DPRD. Second, regarding the legal subjects in this article are each political party participating in the general election. Third, the particular legal object which is the subject of the author's research is a female council member in the Bandung City DPRD.

This research is a qualitative research and carried out using field study methods and library research, which is collecting data and information with the help of various materials contained in the library room, such as books, notes, previous theses and others. other.

Because a lot of family time is taken up, the steps taken to keep optimizing the roles of mothers and councilors must be good at dividing time and family remains a top priority. so that a wife who works as a member of the board can continue to maintain relations with her husband and children so that they remain qualified in another sense their obligations as a wife and mother can continue to be carried out by maintaining communication with her husband and children, especially regarding matters relating to his activities as a board member. In order for a woman to optimize her role in the home and parliament it is necessary to use quality time to gather with family. In addition, by becoming a member of the board which is a great mandate, it should not be separated from God in the sense that it must always increase spiritual values, keep a distance from non-muhrim and not be too open in giving personal information.

Keywords: Optimization, Role of Wives, Board Members